

ANALISIS PENGALOKASIAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN SERTA
PEMERATAAN EKONOMI DESA
(STUDI KASUS PADA DESA BUNTU KAMIRI)

Elsa Mandela Putri¹, Indriyanti Linting², Wendy Tikupadang³

Universitas Kristen Indonesia Paulus

elsamandelaputri@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan taraf perekonomian masyarakat desa. Jenis penelitian ini menunjukkan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa besaran alokasi dana desa yang diterima khususnya Desa Buntu Kamiri berjalan sesuai dengan aturan pemerintah kota, Pengelolaan dan pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan terealisasi dengan baik dan dirasakan oleh berbagai jajaran terutama masyarakat desa itu sendiri sehingga dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat.

Kata kunci: *Alokasi Dana Desa; Pengelolaan; Sarana dan Prasarana*

Abstract: *The study aims to know the management of allocation of village fund for infrastructure development and improve the community economic level. This type of research uses a qualitative descriptive method. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that, the amount of village fund allocation received, especially in Buntu Kamiri village, is in accordance with city government regulation. The management and utilization of village fund allocation in development is well realized and can be felt by various ranks, especially the village community itself so that it can improve the community's economic level.*

Keywords : *Allocation of Village Fund, Management, Infrastructures*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang besar, posisi geografis yang strategis yang memungkinkan untuk pendayagunaan lahan sepanjang tahun, serta kandungan bumi yang kaya merupakan modal untuk kemakmuran masyarakatnya. Namun sayangnya sumber daya yang ada tersebut belum dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk kemakmuran masyarakat.

Kondisi desa yang relatif banyak masyarakat miskin, sedikit banyak dipengaruhi oleh keterbelakangan pembangunan di daerah pedesaan. Lemahnya pembangunan desa akan dapat meningkatkan dan memberikan kontribusi terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota. Adanya migrasi ini dapat memberikan dampak positif dan negatif pada kota-kota besar, namun lebih banyak negatifnya.

Kondisi desa yang relatif banyak masyarakat miskin, sedikit banyak dipengaruhi oleh keterbelakangan pembangunan di daerah pedesaan. Lemahnya pembangunan desa akan dapat meningkatkan dan memberikan kontribusi terjadinya migrasi penduduk dari desa ke kota. Adanya migrasi ini dapat memberikan dampak positif dan negatif pada kota-kota besar, namun lebih banyak negatifnya.

Desa Buntu Kamiri merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ponrang yang mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Desa Buntu Kamiri memiliki kondisi infrastruktur masih tidak stabil, seperti jalan yang masih berlubang, jalan tani serta irigasi yang masih kurang memadai. Dana Desa dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana desa, namun pembangunan tersebut masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan masih belum maksimal.

Penelitian ini umumnya bertujuan untuk menganalisis penerapan alokasi dana desa di Buntu Kamiri.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa meliputi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Pemerintahan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintah yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa yang terdiri atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan dan kepala dusun. (Ningsih & Handayani, 2016). Pemerintahan desa yang juga yang disebut pemdes diatur oleh melalui peraturan pemerintah No.72 tahun 2015 yaitu pemerintah desa merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola pemerintahan di wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur dalam ketentuan pasal 216 ayat(1) UU Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah karena lembaga pemerintahan desa juga dilindungi hukum Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala desa memiliki beberapa kewenangan seperti kewenangan memimpin penyelenggaraan.(Indahningrum et al., 2020)

Pemerintah Desa

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari suatu pembangunan nasional dalam otonomi daerah. Pembangunan suatu desa sangat memegang peranan penting dan strategis dalam pembangunan nasional serta pembangunan daerah, dikarenakan terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Lili, 2018)

Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. ADD merupakan perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. ADD merupakan bagian dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten. (Munir, 2013)

METODE

Jenis penelitian ini termasuk dalam metode deskriptif dengan menggunakan analisis secara kualitatif untuk mengumpulkan dan mengelola data-data yang ada pada objek penelitian khususnya pada Kantor Desa Buntu Kamiri Kabupaten Luwu. Oleh sebab itu, maka digunakanlah pendekatan kualitatif sebagai metode penelitian ini dengan harapan akan mendapatkan deskripsi yang jelas tentang data serta informasi yang dibutuhkan agar tetap in fact, sesuai dengan fakta yang ada, bukan rekaan semata. Peneliti menggunakan metode study kasus karena peneliti menganggap kejadian ini adalah suatu kejadian yang ganjal dan harus di pecahkan permasalahannya. **Pengumpulan data**

a. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala-gejala atau fenomena yang berkaitan dengan perilaku manusia. Teknik observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dalam observasi ini peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang di observasi.

b. Wawancara

merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Dokumentasi

Yaitu bukti-bukti dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperlukan penulis untuk di sajikan bahan dalam pembuatan penelitian.

Teknik Analisis Data

Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan konkrit dari subjek penelitian. Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi :

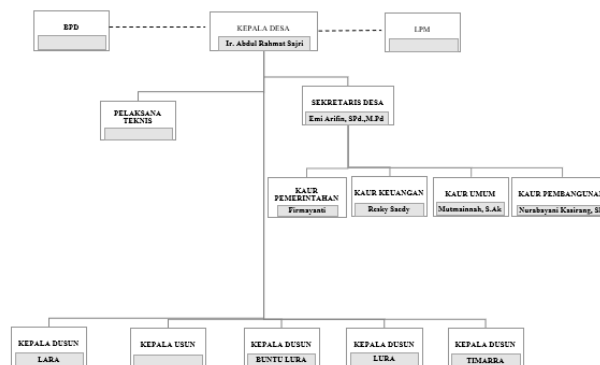
1. Reduksi Kata
2. Penguraian Data
3. Pembuatan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa

Desa Buntu Kamiri merupakan salah satu Desa pemekaran dari desa Tirowali Kabupaten Luwu pada Kecamatan Ponrang tahun 1990. Desa Buntu Kamiri pada saat pertama kalinya, Desa terbentuk di wilayah Kabupaten Luwu masuk dalam Kecamatan Bua Ponrang, bersama dengan Desa Padang Sappa, Desa Noling, Desa Tirowali, Desa Mario, Desa Jenne Maeja, Desa Bakti, Desa Puti dan Desa karang-karangan. Pada pemerintah Kepala Desa Buntu Kamiri yang pertama yaitu Bapak Musmail yang berasal dari pegawai kecamatan yang ditunjuk langsung Camat Bupon pada saat itu.

Desa Buntu Kamiri salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu yang berjarak 30 km dari kota Palopo, jarak ke kecamatan 3 km. Secara administratif Desa Buntu Kamiri yang terdiri dari 4 Dusun berbatasan dengan Desa Tirowali disebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Padang Sappa, sebelah timur berbatasan dengan Desa Muladimeng, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Buntu Nanna. Letak Desa Buntu Kamiri yang berada di tengah-tengah menjadikannya strategis. Luas wilayah Desa Buntu Kamiri 814 Ha yang didalamnya terdapat area persawahan, perkebunan, tambak dan lainnya. Ini merupakan tempat yang tepat dan nyaman untuk tempat tinggal.



Gambar 1.

Organisasi Pemerintah Desa Buntu Kamiri

Struktur

PEMBAHASAN

Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Perencanaan pembangunan desa diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Musrembang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintahan desa, bekerja sama dengan warga dan pemangku kepentingan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir, Abdul Rahmat Sajri mengatakan bahwa:

"Dalam perencanaan Dana Desa kami pemerintahan desa Buntu Kamiri memberitahukan kepada masyarakat bahwa akan mengadakan musyawarah Musrembang tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan. Jika dalam

musrembang tersebut sudah disepakati maka akan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang kemudian akan di usulkan ke kecamatan, setelah itu pihak kecamatan akan mengusulkan ke pusat, dan jika usulan RAB di terima maka dana desa akan dicairkan."

Dalam kegiatan Musrembang masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memutuskan hal yang akan dilaksanakan dalam kegiatan, hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Markus Lomo yang mengatakan bahwa":

"Sebelum aparat desa melakukan Rancangan Anggaran Biaya (RAB), aparat desa mengajak masyarakat untuk ikut dalam musyawarah perencanaan pembangunan tentang kebutuhan yang diperlukan di Desa Buntu Kamiri, seperti dalam pembangunan jalan tani ataupun irigasi."

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahapan perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Buntu Kamiri Kecamatan Ponrang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di awali dengan kegiatan musyawarah atau musrembang guna membahas rancangan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan adalah dimulai dan dilaksanakannya pembangunan desa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Wawancara dengan ibu Emi Harifin mengatakan bahwa :

"Bentuk pelaksanaan pembangunan infastruktur Desa Buntu Kamiri dilakukan dengan swakelola, dimana kami merekrut para pekerja dari masyarakat Buntu Kamiri sendiri. Namun yang sangat memprihatinkan yaitu para pekerja yang kami rekrut tidak bekerja sesuai dengan yang diharapkan sehingga waktu pelaksanaan kegiatan sering melewati batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu rancangan waktu pelaksanaan dimulai nya kegiatan juga mengalami masalah dimana adanya penundaan. Hal ini disebabkan keterlambatan dalam pencairan dana yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan dan juga hambatan dalam perizinan atas lahan atau tanah masyarakat yang terpakai untuk pembangunan."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa dalam tahap pelaksanaan alokasi dana desa di Buntu Kamiri masih ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu: keterlambatan dalam pencarian dana kegiatan, waktu kegiatan tidak sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya, dan kurangnya perhatian dan partisipasi dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDdesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana desa yang dibuat secara rutin setiap 6 bulan sekali sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berasal dari realisasi penerimaan dan belanja dana desa. Kedua, laporan akhir dari penggunaan dana desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir dana desa. Bapak Abdul Rahmat Sajrih mengatakan bahwa:

"Dalam tahap pelaporan ada dua yang harus dibuat yaitu laporan berkala (laporan yang dibuat rutin dalam jangka waktu tertentu) dan laporan akhir. Laporan yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan dan aturan dalam pembuatan. Tujuan dari pelaporan ini yaitu untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, hambatan dan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan."

Pertanggungjawaban pemerintahan Desa Buntu Kamiri dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan bersifat terbuka atau transparan kepada masyarakat. Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah wajib memberikan laporannya kepada camata atau pun ke bupati. Dan pemerintah desa juga harus menyampaikan pelaporan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Namun dalam hal pelaporan Desa Buntu Kamiri belum terlaksana secara maksimal dengan yang diharapkan karena masih mengalami keterlambatan dalam membuat dan penyerahan laporan.

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya harus didukung pula dengan fasilitas yang memadai dari desa itu sendiri. Dan harus menunjang segala aspek kehidupan dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut agar semakin maju. Fasilitas tersebut seperti jalan raya, akses jalan ke lahan (jalan tani) ataupun irigasi. Ibu Emi Arifin mengatakan bahwa :

“Rencana yang telah disepakati dalam musrembang sebagian besar sudah terealisasi, hasil-hasil pembangunan fisik dalam hal ini pembangunan sarana dan prasarana desa serta pemberdayaan masyarakat tersebut baik diantaranya jalan raya dan jalan pertanian.”

Bapak Gideon juga mengatakan bahwa:

“Dalam pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan di Desa Buntu Kamiri sudah mengalami banyak perubahan dan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunannya dapat dilihat dari sejauh mana sesuai dengan apa yang sudah di bangun.”

Hal serupa juga disampaikan oleh ibu Erni Sadar, yang mengatakan bahwa:

“Dengan adanya perubahan perbaikan jalan yang dulunya hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki yang sangat memerlukan waktu yang sangat banyak sehingga kitanya sebagai masyarakat hanya bisa pasrah, tapi sekarang dengan adanya program perbaikan jalan jalan sudah bisa ditempuh menggunakan kendaraan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan suatu kegiatan yang mayoritas penduduk desa adalah Bertani.”

Dengan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Buntu Kamiri telah menggunakan dan memanfaatkan dana desa dengan baik untuk melaksanakan pembangunan desa baik dalam infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan perbaikan sarana dan prasarana desa. Adapun manfaat bagi masyarakat diantaranya: memudahkan masyarakat untuk membawa hasil panen dari kebun ke pasar, membawa padi ke tempat penggilingan dan memudahkan masyarakat dalam pengairan sawah karena adanya irigasi. Dengan adanya kemudahan dan manfaat tersebut tentunya sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan alokasi dana desa pada desa buntu kamiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan hasil penelitian menunjukan dalam tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa di Buntu Kamiri sudah diawali dengan melakukan kegiatan Musrembang yang melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan dan perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Namun dalam tahap pelaksanaan dan pelaporan belum terlaksana sesuai dengan peraturan. Dimana dalam tahap pelaksanaan mengalami keterlambatan pada pencairan dana kegiatan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pembangunan tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dalam tahap pelaporan juga mengalami keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan. Penggunaan dana desa dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Desa Buntu Kamiri sangat berpengaruh dan berdampak baik terhadap perekonomian dan hasil pendapatan masyarakat. Karena dengan adanya

pembangunan yang dilaksanakan sangat bermanfaat dan membantu petani dalam memenuhi kebutuhan dan juga dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Indahningrum, R. putri, Naranjo, J., Hernández, Naranjo, J., Peccato, L. O. D. E. L., & Hernández. (2020). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Peningkatan Taraf Perekonomian Masyarakat di Desa Pattangnga Kec. Bola Kab. Wajo. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2507(1), 1–9. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027><https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Artikel Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura*, 1(ekonomi), 5–19.
- Munir, A. (2013). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Desa di Desa Maradekaya Kecamatan Bajeng Gowa*. 1(69), 5–24.
- Ningsih, H. M., & Handayani, N. (2016). Analisis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dalam Transparansi Dan Akuntansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan. 1–23.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1–14.
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(3), 287–295. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>
- Ruru, N., Kalangi, L., & Budiarto, N. S. (2017). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara). *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 83–90. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17140.2017>
- Sholeh, R. (2019). Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Menurut Prespektif Ekonomi Islam. *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*.
- Wibowo, G. A. (2017). Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 13(3), 313–325. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/pwk/article/view/17440>